PEMERINTAH KOTA MALANG

DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun 2019 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan analisis capaian kinerja kegiatan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Disamping itu Laporan ini memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan terwujudnya kualitas tenaga kerja yang berdaya saing, penanaman modal dan layanan perizinan dan non perizinan yang akuntabel.

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang ini tidak terlepas dari kendala-kendala teknis. Namun demikian telah diupayakan seoptimal mungkin untuk mengatasi hal tersebut, melalui pendekatan koordinasi serta asistensi dari berbagai narasumber yang kompeten. Mudah-mudahan Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur pada tahun-tahun berikutnya.

Malang, Februari 2020

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT.
Pembina Utama Muda
NIP.19730425 199803 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR LAMPIRAN iv

RINGKASAN EKSEKUTIF v

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Gambaran Umum 1

B. Isu-Isu Strategis 8

BAB II. PERENCANAAN PERJANJIAN KINERJA 10

I. DINAS TENAGA KERJA 10

A. Perencanaan Kinerja 10

B. Indikator Kinerja Utama 12

C. Perjanjian Kinerja 13

D. Standar Penilaian 14

II. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 14

A. Perencanaan Kinerja 14

B. Indikator Kinerja Utama 18

C. Perjanjian Kinerja 19

D. Standar Penilaian 20

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 22

I. DINAS TENAGA KERJA 22

A. Capaian Kinerja Organisasi 22

B. Realisasi Anggaran 36

II. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 38

A. Capaian Kinerja Organisasi 39

B. Realisasi Anggaran 50

BAB IV. PENUTUP 53

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Hasil Penilaian Capaian Sasaran Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019	vi
Tabel 2	Hasil Penilaian Capaian Sasaran Dinas PMPTSP Tahun 2019	vi
Tabel 3	Ikhtisar Capaian Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2019	vii
Tabel 4	Ikhtisar Capaian Indikator Kinerja Dinas PMPTSP Tahun 2019	viii
Tabel 2.1.	Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas TenagaKerja MPTSP Tahun 2018-2023	11
Tabel 2.2.	Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas PMPTSP Tahun 2018-2023	16
Tabel 3.1.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019	23
Tabel 3.2.	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023	25
Tabel 3.3.	Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra	27
Tabel 3.4.	Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya	27
Tabel 3.5.	Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)	29
Tabel 3.6.	Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019	30
Tabel 3.7.	Analisa Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Program/Kegiatan	31
Tabel 3.8.	Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Malang Tahun 2019	36
Tabel 3.9.	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019	40
Tabel 3.10	Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023	41
Tabel 3.11.	Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra	43
Tabel 3.12	Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya	44
Tabel 3.13	Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)	46
Tabel 3.14	Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019	48
Tabel 3.15	Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Malang Tahun 2019	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023
Lampiran 2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Lampiran 3. Pengukuran Kinerja Tahun 2019

RINGKASAN EKSEKUTIF

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dan kebijakan, maka disusunlah Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang yang berfungsi sebagai media dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi. Dalam laporan kinerja ini disajikan laporan kinerja dari dua perangkat daerah yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah mengalami reorganisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah menjadi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun 2019 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan dalam bidang tenaga kerja, penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan. Keberhasilan di dalam memberikan pelayanan ini tentunya bukan hanya keberhasilan dari Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu semata, tetapi juga menggambarkan keberhasilan dan dukungan serta partisipasi masyarakat serta koordinasi dengan instansi terkait. Selain itu, Laporan kinerja ini juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan kebutuhan bagi pembuat keputusan agar dapat mengintepretasikan keberhasilan dan kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam.

Berdasarkan hasil pengukuran atas rencana kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Malang tahun 2019 menunjukkan bahwa capaian kinerja dari 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja yang telah ditetapkan

secara umum tercapai dengan sangat berhasil dengan rata-rata capaian sebesar 136,75%. Adapun pencapaian sasaran ini didukung oleh kebijakan yang terangkum dalam 9 program 41 kegiatan. Adapun hasil pengukuran dapat dijelaskan berikut ini :

Tabel 1
Hasil Penilaian Capaian Sasaran Dinas Tenaga Kerja
Tahun 2019

Rentang Capaian (%)	Pencapaian	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil	2	3
90 ≤ x < 110	Tercapai/ Berhasil	1	1
60 ≤ x < 90	Cukup tercapai/ Cukup berhasil	-	-
x < 60	Tidak tercapai/ Tidak berhasil	-	-

Sedangkan hasil pengukuran atas rencana kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang tahun 2019 menunjukkan bahwa capaian kinerja dari 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja yang telah ditetapkan secara umum tercapai dengan sangat berhasil dengan rata-rata capaian sebesar 159%. Adapun pencapaian sasaran ini didukung oleh kebijakan yang terangkum dalam 9 program 41 kegiatan. Adapun hasil pengukuran dapat dijelaskan berikut ini.

Tabel 2
Hasil Penilaian Capaian Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019

Rentang Capaian (%)	Pencapaian	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil	2	3
90 ≤ x < 110	Tercapai/ Berhasil	2	2
60 ≤ x < 90	Cukup tercapai/ Cukup berhasil	-	-
x < 60	Tidak tercapai/ Tidak berhasil		

Secara umum kategori tercapai/berhasil atau tidak tercapai ini disumbangkan oleh kinerja atas program dan kegiatan Ketenagakerjaan, Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Namun demikian, keberhasilan yang dicapai tidak terlepas dari hambatan-hambatan atau permasalahan-permasalahan yang dijumpai baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas permasalahan yang terjadi, sehingga diketahui penyebab munculnya permasalahan atau hambatan dalam pencapaian kinerja.

Adapun kinerja pencapaian sasaran di bidang ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Malang, dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel 3
Ikhtisar Capaian Indikator Kinerja Dinas Tenaga Kerja
Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
Meningkatnya penempatan tenaga kerja yang kompeten.	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	40%	73,49%	183,73%
	Persentase lulusan pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	25%	35,90%	143,59%
Meningkatnya pemahaman pengusaha dan pekerja terkait hubungan industrial.	Persentase sengketa pengusaha – pekerja per tahun	4,35%	3,57%	117,98%
Meningkatnya kualitas pelayanan ketenagakerjaan.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	80,45	81,83	101,72%

Dari Tabel 3 di atas terlihat bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Malang secara umum seluruh indikator kinerja telah tercapai sesuai target yang ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran, perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan yang digunakan dalam pencapaian kinerja, dimana dalam hal ini tertuang dalam program dan kegiatan bidang ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pada perencanaan strategisnya Dinas Tenaga Kerja Kota

Malang pada tahun 2019 merencanakan sebanyak 9 program dan 42 kegiatan yang telah terealisasi sebanyak 9 program dan 41 kegiatan.

Adapun kinerja pencapaian sasaran di bidang Penanaman Modal, Pelayanan perizinan dan Non Perizinan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4
Ikhtisar Capaian Indikator Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks kematangan SPBE pada aspek Pelayanan Publik	2,6	2,67	103%
Meningkatnya Nilai Penanaman Modal dan Investasi Daerah	Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	3.60%	12,71%	353%
Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	85	88	103%
	Persentase penerbitan izin dan non izin	80%	97%	121%
Terpenuhinya kontribusi IMB terhadap PAD	Persentase realisasi target retribusi IMB	100%	116%	116%

Dari Tabel 4 di atas terlihat bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang secara umum indikator kinerja telah tercapai, hanya 1 indikator kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan. Dalam rangka meningkatkan kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran, perlu didukung oleh kebijakan-kebijakan yang digunakan dalam pencapaian kinerja, dimana dalam hal ini tertuang dalam program dan kegiatan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Oleh karena itu, pada perencanaan strategisnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Kota Malang pada tahun 2019 merencanakan sebanyak 9 program dan 45 kegiatan dan telah terealisasi seluruhnya.

Seluruh capaian kinerja utama tersebut di atas tentu dihasilkan dengan dukungan Sumber Daya Manusia dan Anggaran. Dalam tahun 2019, telah dipergunakan anggaran dan Sumber Daya Manusia sebagai berikut:

A. Dinas Tenaga Kerja
   1. Realisasi penggunaan dana adalah senilai Rp.3.842.834.571.00 dari anggaran sebesar Rp.4.267.180.000,00 atau mencapai 90,06 %
   2. Realisasi pemanfaatan sumber daya manusia adalah sebesar 26 orang per bulan Desember 2019.

B. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
   1. Realisasi penggunaan dana adalah senilai Rp.4.740.787.360,00 dari anggaran sebesar Rp.5.236.230.000,00 atau mencapai 90,54 %
   2. Realisasi pemanfaatan sumber daya manusia adalah sebesar 52 orang per bulan Desember 2019.

Pelaporan akuntabilitas kinerja ini selain menjadi media evaluasi, juga menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, hal terpenting dari laporan ini adalah menggali pelajaran untuk pembenahan kedepan. Menyadari hal tersebut, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang telah mempersiapkan strategi-strategi pembenahannya, sehingga tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan dapat diminimalisir.

BAB I
PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Laporan Kinerja dibuat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan perencanaan strategik yang ditetapkan, maka diperlukan pengukuran kinerja dan evaluasi yang disajikan melalui keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2019.

Penyusunan Laporan Kinerja ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip "*good governance*". Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2019 ini adalah untuk memberikan informasi tentang hasil pelaksanaan kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang disepakati oleh Kepala Perangkat Daerah dengan Walikota.

Terkait dengan transparansi dan akuntabilitas, maka Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dituangkan di dalam program kegiatan Tahun Anggaran 2019 serta pengelolaan sumber daya yang dipercayakan. Pertanggungjawaban dimaksud dilakukan melalui pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan media pertanggungjawaban secara periodik dan melembaga sebagai salah satu persyaratan untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);;
b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Peraturan Daerah Kota Malang 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
e. Peraturan Walikota Malang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;
f. Peraturan Walikota Malang Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
g. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
h. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

2. Maksud dan tujuan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang tahun 2019.

Tujuan dari pelaporan kinerja untuk memberikan informasi kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun 2019 yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dilaksanakan dan seharusnya dicapai sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

3. Kelembagaan

a. Pembentukan Organisasi

Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kota Malang 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

b. Kedudukan Organisasi

Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

c. Struktur Organisasi

Dasar pembentukan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 67 TAHUN 2019
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PTSP

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PTSP

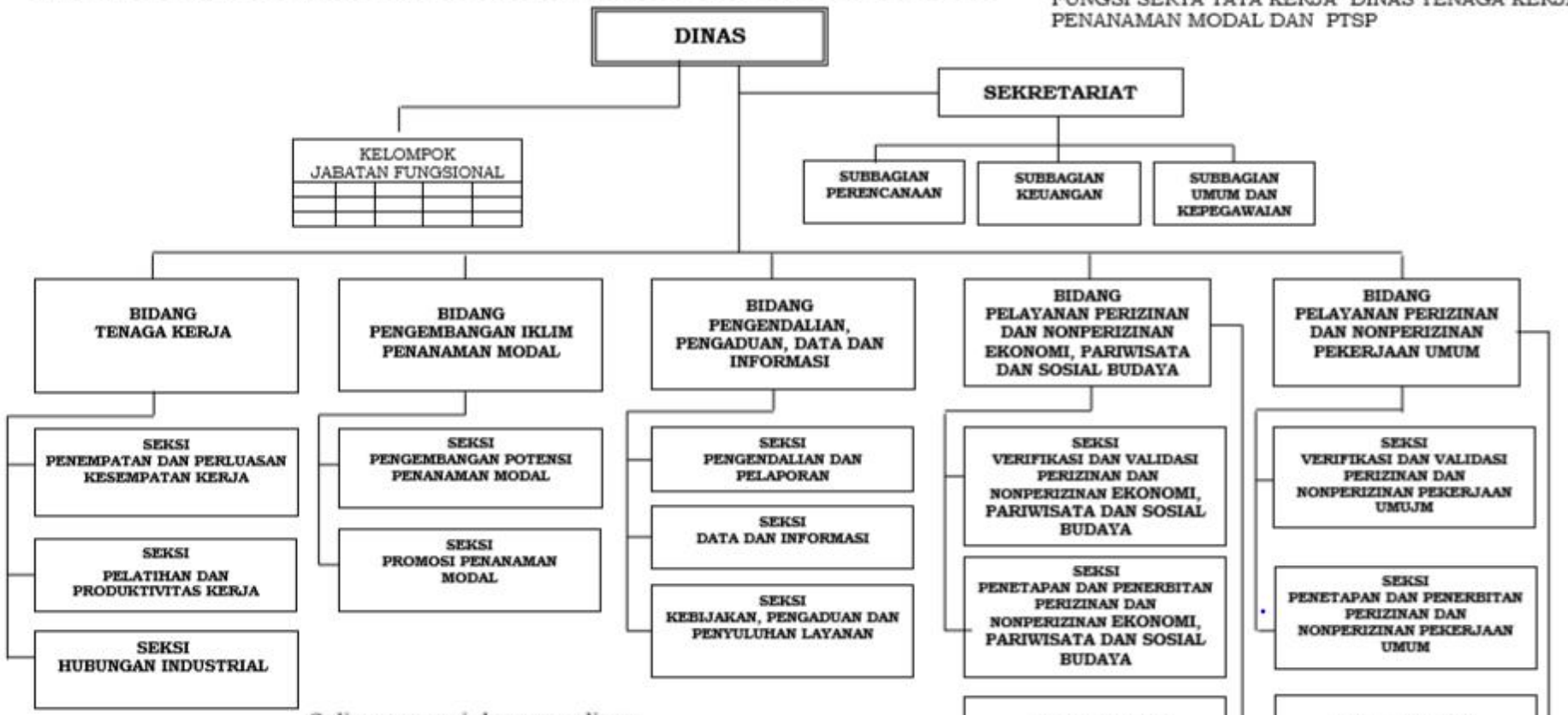

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

d. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

(1) Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah, serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan PMPTSP menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang tenaga kerja, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
b. pelayanan perizinan dan nonperizinan;
c. pelaksanaan pelatihan ketenagakerjaan;
d. pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta dan lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
e. pembinaan bidang ketenagakerjaan, penanaman modal, pelayanan perizinan dan nonperizinan;
f. pemberian konsultansi produktivitas pada perusahaan kecil;
g. pengukuran produktivitas tenaga kerja;
h. pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan serta perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja;
i. koordinasi perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri pra dan purna penempatan;
j. koordinasi pengawasan tenaga kerja asing;
k. pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam Daerah;

l. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan di Daerah;
m. penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal;
n. penyusunan peta potensi investasi;
o. penyelenggaraan promosi penanaman modal;
p. fasilitasi kemitraan pelaku usaha kecil, menengah, dan besar;
q. pengendalian pelaksanaan tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan;
r. pengelolaan data dan informasi tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan yang terintegrasi;
s. pencabutan izin atas pelanggaran terhadap perizinan dan nonperizinan yang diterbitkan;
t. pengembangan sistem informasi dan pengolahan data tenaga kerja, penanaman modal, dan perizinan;
u. pelaksanaan penanganan pengaduan dan informasi tenaga kerja, penananman modal, dan perizinan;
v. pengawasan dan/atau penindakan pelanggaran terhadap peraturan di bidang tenaga kerja, penanaman modal dan perizinan;
w. pemberdayaan dan pembinaan jabatan fungsional;
x. pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
y. pelaksanaan administrasi di bidang tenaga kerja dan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
z. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tenaga kerja dan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota di bidang tenaga kerja dan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

B. ISU-ISU STRATEGIS

Isu Strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang tidak terlepas dari permasalahan yang selama ini muncul. Beberapa isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka pengangguran, yang disebabkan oleh terbatasnya kesempatan kerja di sektor formal serta pertumbuhan angkatan kerja yang lebih besar dibandingkan dengan lapangan kerja;
2. Rendahnya kualitas dan kompetensi SDM pencari kerja;
3. Kurang relevansinya program pelatihan kerja dengan kebutuhan industri sehingga terjadi ketimpangan antara kebutuhan industrial perusahaan dengan kompetensi angkatan kerja;
4. Belum optimalnya kondisi ketenagakerjaan, ditandai oleh hubungan industrial yang masih rentan akibat kurang harmonisnya hubungan antara pengusaha dan pekerja;
5. Terbatasnya perlindungan tenaga kerja yang ditandai dengan masih tingginya pelanggaran norma ketenagakerjaan.
6. Kemudahan dalam pengurusan perizinan baik izin usaha dan penanaman modal. Selaras dengan program pemerintah untuk meningkatkan kemudahan investasi melalui berbagai kebijakan perizinan berusaha, dimana kemudahan berusaha berpengaruh terhadap minat pelaku usaha untuk melakukan investasi di Kota Malang.
7. Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :
    a. Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah dilaksanakan pada DPMPTSP dengan ditambahkannya kewenangan pelayanan perizinan dan Non perizinan dari 14 Izin menjadi 56 perizinan dan Non Perizinan yang didukung dengan Sumber Daya Manusia dan sarana prasarana yang memadai’
    b. Komitmen dan konsistensi Pemerintah Kota malang untuk melaksanakan Perizinan Berusaha melalui Online Single Submission sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi secara Elektronik.

8. Iklim Investasi

   Kota Malang sebagai Kota yang berkembang secara pesat memiliki potensi investasi yang sangat memungkinkan untuk dikembangkan dan mempunyai nilai jual yang strategis untuk meningkatkan sektor perekonomian berbasis ekonomi kreatif, melalui :

   a. Optimalisasi pemetaan potensi investasi;
   b. Optimalisasi promosi dan kerjasama kemitraan di bidang investasi;
   c. Optimalisasi layanan perizinan dan non perizinan;
   d. Optimalisasi data perizinan, non perizinan penanaman modal.

9. Kualitas Pelayanan Publik.

   DPMPTSP berusaha mewujudkan kualitas pelayanan yang berfokus pada masyarakat, yang diimplementasikan melalui penyediaan sarana dan prasarana serta Sistem Layanan yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang 5 tahun 2019 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Tenaga Kerja Kota Malang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang mengalami reorganisasi menjadi Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Malang yang mengemban tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah, serta Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sehingga Laporan Kinerja yang disusun adalah laporan kinerja Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

I. DINAS TENAGA KERJA

A. Perencanaan Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan perlu diadakan suatu rumusan perencanaan kinerja baik perencanaan strategis maupun rencana kerja tahunan yang merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis dan rencana kerja instansi pemerintah, yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja dengan kegiatan, program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Malang yang akan dicapai dalam kurun waktu 2018-2023.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang akan dicapai Dinas Tenaga Kerja Kota Malang pada akhir periode renstra adalah “Tercapaianya penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)”.

Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, perlu ditentukan sasaran yang akan dicapai. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam urusan yang spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang pendek. Di dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Malang, terdapat sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya penempatan tenaga kerja yang kompeten.
2. Meningkatnya pemahaman pengusaha dan pekerja terkait hubungan industrial.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan ketenagakerjaan.

Tabel 2.1
Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra
Tahun 2018-2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADAT TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
Tercapainya penanganan Tingkat Penganggura n Terbuka (TPT)	Persentase Daya Serap Tenaga Kerja	-	-					65%
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja yang kompeten	1 Persentase pencari kerja yang ditempatkan	40%	45%	50%	55%	60%
			2 Persentase lulusan pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	25%	25%	30%	30%	35%
		Menningkatn ya pemahaman pengusaha dan pekerja terkait hubungan industrial	Persentase sengketa pengusaha – pekerja per tahun	4,35%	4,30%	4,25%	4,20%	4,15%
		Meningkatny a kualitas pelayanan ketenagakerj aan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	80,45	80,85	81,26	81,66	82,00

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal.

Adapun strategi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja

2. Meningkatkan pelaksanaan pelatihan kerja yang mempunyai daya saing untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja
3. Meningkatkan pembinaan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha dan perbaikan syarat kerja
4. Meningkatkan dukungan pelayanan ketenagakerjaan

Adapun arah kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah penempatan kerja
2. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
3. Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
4. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana dan peningkatan kinerja pelayanan

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/234/35.73.122/2019 tentang Penetapan Indikator Utama Pemerintah Kota Malangdan Perangkat Derah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023.

Adapun IKU Dinas Tenaga Kerja Kota Malang sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	**Tercapainya penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**	**Persentase Daya Serap Tenaga Kerja**					**65%**
1.1	Meningkatnya penempatan tenaga kerja yang kompeten	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	40%	45%	50%	55%	60%
		Persentase lulusan pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	25%	25%	30%	30%	35%
1.2	Meningkatnya pemahaman pengusaha dan pekerja terkait hubungan industrial	Persentase sengketa pengusaha – pekerja per tahun	4,35%	4,30%	4,25%	4,20%	4,15%
1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan ketenagakerjaan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	80,45	80,85	81,26	81,66	82,00

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran staregis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2019 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Malang Tahun 2019 secara rinci adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Tercapainya penanganan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatnya penempatan tenaga kerja yang kompeten	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	40%	1. Program peningkatan kesempatan kerja 2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial dibidang ketenagakerjaan sektor penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	547.057.200 750.000.000
	Persentase lulusan pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	25%	1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial dibidang ketenagakerjaan sektor pelatihan dan produktivitas	577.963.250 450.000.000
Meningkatnya pemahaman pengusaha dan pekerja terkait hubungan industrial	Persentase sengketa pengusaha – pekerja per tahun	4,35%	Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan	857.494.550

Meningkatnya kualitas pelayanan ketenagakerjaan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	80,45	1. Program pelayanan administrasi perkantoran 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4. Program peningkatan pengembangan system pelaporan, capaian kinerja dan keuangan	533.560.000 326.590.000 100.000.000 124.515.000

D. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Malang maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
90 ≤ x < 110	Tercapai/ Berhasil
60 ≤ x < 90	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
x < 60	Tidak tercapai/ Tidak berhasil

II. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG.

A. Perencanaan Kinerja

Sejalan dengan amanat Undang-undang tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Malang mempunyai kewajiban mereviu Renstra SKPD yang berpedoman pada Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010. Dalam peraturan tersebut, yang dimaksud dengan Renstra SKPD adalah produk Perencanaan Pembangunan Daerah yang menjadi

acuan bagi Dinas, Badan atau unit kerja pemerintah dan pelaksanaan tugas pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai Dinas baru yang merupakan salah satu lembaga perangkat daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kota Malang, tugasnya melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dinas baru ini merupakan peleburan dari Badan Pelayanan Perizinan Tepadu Kota Malang dengan Bagian Kerjasama dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kota Malang.

Renstra 2013 – 2018 disusun untuk lebih mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan program sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang. Adapun Tujuan, Sasaran dan Kebijakan mengacu Misi Pemerintah Kota Malang yaitu Misi kedua Meningkatkan Produktivitas dan daya saing Daerah dan Misi kelima Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Kualitas Pelayanan Publik yang profesional, akuntabel dan berorientasi pada Kepuasan masyarakat.

1. Tujuan dan Sasaran

Dalam mencapai misi yang telah ditetapkan, perlu ditentukan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasran organisasi merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi kedua yaitu Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan serta pada misi Keempat adalah Memastikan Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang, menetapkan tujuan dan sasaran untuk kurun waktu 2018-2023 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Tujuan dan Sasaran Renstra
Tahun 2018 - 2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	TARGET KINERJA SASARAN PADAT TAHUN KE				
				2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya Kualitas Layanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang prima untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Realisasi Penerimaan Retribusi IMB	Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks kematangan SPBE pada aspek pelayanan publik	2,6	3,0	3,5	3,8	4,5
	Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	Meningkatnya Nilai Penanaman Modal dan Investasi Daerah	Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	3.60 %	3.70 %	3.80 %	3.90 %	4.00 %
		Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan dan Non Perizinan	85	85.5	86	86.5	87
			Persentase Penrbitan Izin Izin dan Non Izin	80	82.5	85	87.5	90
		Terpenuhinya kontribusi IMB terhadap PAD	Persentase Realisasi Target Retribusi IMB	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2. Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal.

Adapun strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan layanan kemudahan berusaha dengan merealisasikan Online Single Submission.
b. Meningkatkan daya tarik penanaman modal yaitu pemberian insentif fiskal dan non fiskal yang lebih menarik dan transparan untuk mengembangkan penanaman modal.
c. Mempercepat realisasi penanaman modal melalui kegiatan proaktif memfasilitasi penyelesaian permasalahan / hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal.

d. Peningkatan efektivitas strategi dan upaya promosi investasi
e. Meningkatkan fasilitasi kemitraan antara Pemerintah Kota Malang dengan sektor swasta
f. Memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal
g. Menyusun suatu aplikasi layanan yang berbasis elektronik dan berintegrasi dengan OPD lainnya.
h. Meningkatkan kualitas layanan perizinan IMB

Adapun arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang adalah sebagai berikut :

a. Mengintesifkan sosialisasi OSS kepada pelaku usaha
b. Membangun Klinik investasi untuk memberikan panduan kepada masy dalam pengajuan perizinan dan non perizinan penanaman modal baik melalui OSS maupun non OSS
c. Menindaklanjuti layanan pemenuhan komitmen bagi pelaku usaha yang telah memiliki NIB
d. Menyusun rekomendasi kebijakan insentif termasuk kriteria, prosedur, kewajiban dan monitoring
e. Melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kewajiban penanam modal dalam memanfaatkan fasilitas
f. Inventarisasi proyek penanaman modal yang mengalami hambatan
g. Identifikasi permasalahan / hambatan dalam pelaksanaan penanaman modal
h. Melakukan koordinasi dengan OPD teknis untuk mencari solusi dan penentuan jadwal penyelesaian masalah
i. Melakukan monitoring dan pelaporan
j. Pengembangan strategi promosi investasi Kota Malang yang lebih efisien dan efektif
k. Pengembangan bahan promosi investasi Kota Malang
l. Mendorong dan memfasilitasi kemitraan antara Pemerintah Kota dengan swasta
m. Mengembangkan kerangka kemitraan penanaman modal dalam rangka meningkatkan daya saing.

n. Melakukan sosialisasi pemanfaatan kemitraan kepada dunia usaha.
o. Menyusun Standar Pelayanan dan SOP terhadap perizinan dan non perizinan yang telah dilimpahkan dengan melibatkan peran serta dan masukan dari masyarakat
p. Pengembangan Aplikasi Layanan DPMPTSP berbasis elektronik
q. Integrasi aplikasi DPMPTSP dengan OPD Lainnya
r. Melaksanakan Pelayanan Perizinan Keliling (mobil layanan keliling)

B. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/234/35.73.122/2019 tentang Penetapan Indikator Utama Pemerintah Kota Malangdan Perangkat Derah di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2019-2023.

Adapapun IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

No.	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Terwujudnya Kualitas Layanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang prima untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Realisasi Penerimaan Retribusi IMB	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase kematangan kapabilitas proses SPBE	2,6	3,0	3,5	3,8	4,5

3.	Meningkatnya Nilai Penanaman Modal dan Investasi Daerah	Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah					
4.	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	85	85.5	86	86.5	87
		Persentase penerbitan izin dan non izin	80%	82.5%	85%	87.5%	90%
5.	Terpenuhinya kontribusi IMB terhadap PAD	Persentase realisasi target retribusi IMB	100%	100%	100%	100%	100%

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci indikator kinerja dan target yang ingin dicapai dalam tahun 2019 serta menyebutkan tentang program dan uraian kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran strategis.

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja utama dan rencana capaiannya.

Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan.

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Tahun 2019 secara rinci sebagai berikut :

Tujuan : Terwujudnya Kualitas Layanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang prima untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dengan Sasaran, Indikator dan Target sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase kematangan kapabilitas proses SPBE	2,6%	Pengolahan Data dan Informasi	423,890,000
Meningkatnya Nilai Penanaman Modal dan Investasi Daerah	Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	3.60%	- Pengembangan Iklim Penanaman Modal - Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal	463,463,332 388,380,306
Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	85	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan , Capaian Kinerja, dan Keuangan	465,723,500
	Persentase penerbitan izin dan non izin	80	Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan	293,860,000
Terpenuhinya kontribusi IMB terhadap PAD	Persentase realisasi target retribusi IMB	100%	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	923,612,000

D. Standar Penilaian Kinerja

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter

keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
90 ≤ x < 110	Tercapai/ Berhasil
60 ≤ x < 90	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
x < 60	Tidak tercapai/ Tidak berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

I. DINAS TENAGA KERJA KOTA MALANG

Akuntabilitas kinerja yang diuraikan pada bab ini menyajikan penjelasan tentang pencapaian sasaran organisasi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Pengukuran capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Malang dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya, sehingga diketahui selisih kinerjanya (performance gap). Berdasarkan performance gap tersebut, dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Dalam proses pengukuran kinerja tersebut, diperhatikan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Capaian Kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :

- Meningkatnya penempatan tenaga kerja yang kompeten.
- Meningkatnya pemahaman pengusaha dan pekerja terkait hubungan industrial.
- Meningkatnya kualitas pelayanan ketenagakerjaan.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Tahun 2019 sebagai berikut adalah :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2019 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran

Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi dari sasaran yang telah diperjanjikan kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	KETERANGAN
Meningkatnya penempatan tenaga kerja yang kompeten.	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	40%	73,49%	183,73%	
	Persentase lulusan pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	25%	35,90%	143,59%	
Meningkatnya pemahaman pengusaha dan pekerja terkait hubungan industrial.	Persentase sengketa pengusaha – pekerja per tahun	4,35%	3,57%	117,98%	
Meningkatnya kualitas pelayanan ketenagakerjaan.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	80,45	81,83	101,72%	
Rata-rata keberhasilan				**136,75%**	

Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai **rata-rata keberhasilan sebesar 136,75%** pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 94,42%.

Pada sasaran "Meningkatnya penempatan tenaga kerja yang kompeten", diperoleh capaian kinerja sebagai berikut :

1. Target Persentase pencari kerja yang ditempatkan sebesar 40%, realisasi sebesar 73,49%%, capaian 183,73% dengan kategori "sangat berhasil". Formulasi perhitungan adalah *Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi Jumlah pencari kerja yang terdaftar dikali 100%*. Adapun jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebesar 718 orang, sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar sebesar 977 orang.
2. Target persentase tenaga kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi sebesar 25%, realisasi sebesar 35,90%, capaian 143,59% dengan kategori "sangat berhasil". Formulasi perhitungan adalah *Jumlah tenaga yang mendapatkan*

sertifikat kompetensi dibagi Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi dikali 100%. Adapun jumlah tenaga kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi sebesar 140 orang, sedangkan Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi sebesar 390 orang.

Pada sasaran "Meningkatnya pemahaman pengusaha dan pekerja terkait hubungan industrial", dengan indikator kinerja Persentase sengketa pengusaha pekerja per tahun ditetapkan target sebesar 4,35%, realisasi sebesar 3,57%, capaian 117,98% dengan kategori "sangat berhasil". Formulasi perhitungan adalah *Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang didaftarkan dibagi Jumlah perusahaan terdaftar dikali 100%*. Pada indikator ini, semakin rendah realisasi berarti semakin tinggi tingkat capaiannya. Adapun jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang didaftarkan adalah 34 kasus, sedangkan jumlah perusahaan terdaftar adalah 953 perusahaan.

Sedangkan Pada sasaran "Meningkatnya kualitas pelayanan ketenagakerjaan", dengan indikator kinerja Nilai Survei Kepuasan Masyarakat ditetapkan target sebesar 80,45 realisasi sebesar 81,83, capaian 101,72% dengan kategori "berhasil".

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023.

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, rasio, dan nilai. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, secara umum dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Namun untuk indikator Persentase sengketa pengusaha pengusaha-pekerja per tahun dihitung dengan rumus bahwa semakin rendah realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik.

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dan pencapaian sasaran strategi Dinas Tenaga Kerja Kota Malang dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang

diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran.

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.2
Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2018-2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KONDISI 2018	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya penempatan tenaga kerja yang kompeten.	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	66,41%	73,49%					183,73%				
	Persentase lulusan pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	24,61%	35,90%					143,59%				
Meningkatnya pemahaman pengusaha dan pekerja terkait hubungan industrial.	Persentase sengketa pengusaha – pekerja per tahun	4,96 %	3,57 %					117,98%				
Meningkatnya kualitas pelayanan ketenagakerjaan.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	81,77	81,83					101,72%				

Pengukuran kinerja dari tahun 2018 – 2023 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

a) Sasaran strategis : Meningkatnya penempatan tenaga kerja yang kompeten.
   a. **Indikator kinerja 1** : Persentase pencari kerja yang ditempatkan. Realisasi tahun 2018 sebesar 66,41%, sedangkan tahun 2019 realisasi sebesar 73,49% dengan capaian 183,73%, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan realisasi kinerja sebesar 7,08%.
   b. **Indikator kinerja 2** : Persentase lulusan pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi. Realisasi tahun 2018 sebesar 24,61%, realisasi tahun 2019 sebesar 35,90% dengan capaian 143,59%, sehingga dapat

disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pada realisasi kinerja sebesar 11,29%.

b) Sasaran strategis : Meningkatnya pemahaman pengusaha dan pekerja terkait hubungan industrial.
   a. **Indikator kinerja 3** : Persentase sengketa pengusaha – pekerja per tahun. Realisasi tahun 2018 sebesar 4,96%, realisasi tahun 2019 sebesar 3,57% dengan capaian 117,98%. Untuk indikator ini, semakin rendah realisasi semakin baik capaian kinerjanya, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pada realisasi kinerja sebesar 1,39%.

c) Sasaran strategis : Meningkatnya kualitas pelayanan ketenagakerjaan.
   a. **Indikator kinerja 4** : Nilai Survei Kepuasan Masyarakat. Realisasi tahun 2019 sebesar 81,83 dengan capaian sebesar 101,72%, realisasi tahun 2018 sebesar 81,77, sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan realisasi kinerja sebesar 0,06.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka menengah	Realisasi Kinerja				
			2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	2	3	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja yang kompeten.	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	60,00%	73,49%				
		Persentase lulusan pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	35,00%	35,90%				
2.	Meningkatnya pemahaman pengusaha dan pekerja terkait hubungan industrial.	Persentase sengketa pengusaha – pekerja per tahun	4,15%	3,57%				
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan ketenagakerjaan.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	82,00	81,83				

4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya

Tabel 3.4
Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Standar Nasional	
				Target	Realisasi
			2019	2019	2019
1	2	2	4	5	6
	NIHIL				

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, urusan ketenagakerjaan menjadi urusan wajib non dasar sehingga Dinas Tenaga Kerja tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM).

5. Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan.

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator

Kinerja selama tahun 2019 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

1) Sasaran strategis 1 :

   Meningkatnya penempatan tenaga kerja yang kompeten, rata-rata capaian indikator sebesar 163,66% telah tercapai secara maksimal sesuai yang diperjanjikan karena meningkatnya penempatan pencari kerja terdaftar melalui beberapa program kegiatan diantaranya penyelenggaraan Job Market Fair, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, Pembinaan Bursa Kerja Khusus, Antar Kerja Antar Negara (AKAN), Pelatihan berbasis kompetensi, Pemagangan Tenaga Kerja di Perusahaan dan berbagai kegiatan lain.

   a. Indikator 1 : Persentase pencari kerja yang ditempatkan telah tercapai 183,73% melebihi target yaitu 40%
   b. Indikator 2 : Persentase lulusan pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi telah tercapai 143,59% melebihi target yaitu 25%

2) Sasaran strategis 2 :

   Meningkatnya pemahaman pengusaha dan pekerja terkait hubungan industrial, rata-rata capaian indikator sebesar 117,98% telah tercapai secara maksimal sesuai yang diperjanjikan karena terlaksananya pembinaan stakeholder ketenagakerjaan secara optimal melalui beberapa program kegiatan diantaranya Pembinaan LKS Tripartit, Pembinaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, Pembahasan dan Sosialisasi UMK, Pembinaan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, Pembinaan Sayarat-Syarat Kerja dan Fasilitasi kasus perselisihan hubungan industrial oleh tenaga mediator hubungan industrial.

a. Indikator 1 : Persentase sengketa pengusaha-pekerja per tahun telah tercapai 117,98% melebihi target yaitu 4,35%.

3) Sasaran strategis 3 :

Meningkatnya kualitas pelayanan ketenagakerjaan, rata-rata capaian indikator sebesar 101,72% telah tercapai secara maksimal sesuai yang diperjanjikan karena terlaksananya program kegiatan penunjang pencapaian peningkatan kualitas pelayanan ketenagakerjaan.

a. Indikator 1 : Nilai Survei Kepuasan masyarakat telah tercapai 101,72% melebihi target yaitu 80,45.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya

Tabel 3.5
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja yang kompeten.	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	40%	73,49%	183,73	1,297,057,200	1,096,756,417	84,56	217,28
	Persentase lulusan pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	25%	35,90%	143,59	1,027,963,250	1,021,433,086	99,36	144,51
Meningkatnya pemahaman pengusaha dan pekerja terkait hubungan industrial.	Persentase sengketa pengusaha – pekerja per tahun	4,35%	3,57%	117,98	857,494,550	825,887,600	96,31	122,50
Meningkatnya kualitas pelayanan ketenagakerjaan.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	80,45	81,83	101,72	1,084,665,000	898,757,468	82,86	122,76

Catatan : > 100%, maka penggunaan dana efektif

< 100%, maka penggunaan dana belum efektif

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

1) Indikator Persentase pencari kerja yang ditempatkan dengan capaian kinerja 183,73% dan capaian anggaran 84,56%,

menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 15,44% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 217,28%

2) Indikator Persentase lulusan pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi dengan capaian kinerja 143,59% dan capaian anggaran 99,36%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 0,64% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 144,51%.
3) Indikator Persentase sengketa pengusaha – pekerja per tahun dengan capaian kinerja 117,98% dan capaian anggaran 96,31%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 3,69% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 122,50%.
4) Indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja 101,72% dan capaian anggaran 82,86%, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran 17,14% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 122,76%.

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Tabel. 3.6
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana tindak lanjut
Meningkatnya penempatan tenaga kerja yang kompeten.	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	183,73	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase peningkatan kesempatan kerja	45%	73,49%	100%	
			Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Ketenagakerjaan Sektor Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase peningkatan lowongan kerja	5%	5%	100%	
	Persentase lulusan pelatihan kerja yang	126,98	Program Peningkatan Kualitas dan	Persentase tenaga kerja yang mendapatka	46,6%	61,34%	131,63 %	

	mendapatkan sertifikat kompetensi		Produktifitas Tenaga Kerja	n pelatihan berbasis kompetensi				

			Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang ketenagakerjaan sektor Pelatihan dan Produktivitas	Persentase peserta pelatihan keterampilan kerja	50,23 %	31,91%	63,54%	Diusulkan penambahan kuota peserta pelatihan
Meningkatnya pemahaman pengusaha dan pekerja terkait hubungan industrial.	Persentase sengketa pengusaha – pekerja per tahun	122,54	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	60%	58,82%	98,04%	
Meningkatnya kualitas pelayanan ketenagakerjaan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	101,72	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	
			Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kendaraan dinas yang layak pakai	100%	94,74%	94,74%	
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur /diklat/ bimtek	100%	96,15%	96,15%	
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal	100%	100%	100%	

Tabel 3.7
Analisa Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Program/Kegiatan

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	99.31	Penyusunan database tenaga kerja daerah	Jumlah dokumen database tenaga kerja yang disusun	1 dokumen	1 dokumen	100	
			Pembinaan Bursa Kerja Khusus	Jumlah peserta Pembinaan Bursa Kerja Khusus	200 orang	200 orang	100	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
			Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang disusun	1 dokumen	0	0	Penyesuaian nomenklatur untuk pelaksanaan reviu RTKD 2017-2022
			Sosialisasi Perlindungan CTKI	Jumlah peserta Sosialisasi Perlindungan CTKI	450 orang	450 orang	100	
Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Ketenagakerjaan Sektor Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	Persentase peningkatan lapangan kerja	100%	Pelayanan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	1. Jumlah perusahaan peserta Job Market Fair. 2. Jumlah peserta Bimtek	1. 60 perusahaan 2. 250 orang	1. 60 perusahaan 2. 250 orang	100	
			Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja bagi Pencari Kerja	Jumlah peserta Pembinaan Bursa Kerja AKAD	500 orang	500 orang	100	
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	131,63	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan keterampilan dan Produktivitas	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan peningkatan keterampilan dan produktivitas	165 orang	165 orang	100	
			Pembinaan Lembaga Produktivitas	Jumlah Lembaga Produktivitas yang dibina	30 lembaga	30 lembaga	100	
Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang ketenagakerjaan sektor Pelatihan dan Produktivitas	Persentase peserta pelatihan keterampilan kerja	63,54	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	Jumlah peserta Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (pelatihan menjahit, membordir, batik tulis, dan olahan makanan berbasis inovasi)	150 orang	150 orang	100	
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	98,04	Pembinaan tentang Pemahaman dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Jumlah peserta Pembinaan tentang Pemahaman dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	250 orang	250 orang	100	
			Pembinaan dan pemberdayaan Serikat pekerja/Serikat Buruh di kota Malang	Jumlah peserta pembinaan dan pemberdayaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Kota Malang	110 orang	110 orang	100	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
			Pembinaan LKS Tripartit Kota Malang dan Pemantauan UMK dan THR	Jumlah rapat LKS Tripartit dan Pemantauan UMK dan THR	6 kali	6 kali	100	
			Sosialisasi UMK Kota Malang	Jumlah peserta sosialisasi UMK kota Malang	250 orang	250 orang	100	
			Pembahasan Usulan UMK Malang	Jumlah rapat dan survey Penentuan KHL dan IHK	9 kali	9 kali	100	
			Bimbingan Teknis Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	100 orang	100 orang	100	
			Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai pembanding UMK Malang Tahun Berjalan	Jumlah dokumen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) hasil survey	11 dokumen	11 dokumen	100	
			Bimbingan Teknis Struktur dan Skala Upah	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Struktur dan Skala Upah	130 orang	130 orang	100	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase surat masuk yang ditindaklanjuti	100	Penyediaan jasa surat menyurat	jumlah surat keluar selama 1 tahun	1500 surat	1567 surat	104.2	
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	jumlah bulan pembayaran belanja Telpon, Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	100	
			Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	jumlah barang milik daerah yang mendapatkan jasa jaminan barang milik daerah	19 kendaraan	19 kendaraan	100	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang ijin diperpanjang	19 kendaraan	19 kendaraan	100	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	jumlah dokumen Surat Permintaan Membayar (SPM) yang diterbitkan	250 SPM	274 SPM	109.6	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luasan ruangan yang dibersihkan	12 ruangan	12 ruangan	100	
			Penyediaan alat tulis kantor	jumlah alat tulis kantor	50 jenis	50 jenis	100	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	15 jenis	15 jenis	100	

PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	RENCANA TINDAK LANJUT
			Penyediaan makanan dan minuman	jumlah makanan dan minuman	9 kali	9 kali	100	
			Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	70 kali	92 kali	131.43	
			Peringatan/Kegiatan Insidentil	jumlah perkiraan kegiatan peringatan/kegiatan insidentil	1 kali	1 kali	100	
			Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas	jumlah pengemudi/supir dinas	1 orang	1 orang	100	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kendaraan dinas yang layak pakai		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	19 kendaraan	19 kendaraan	100	
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	58 peralatan	46 peralatan	79,31	Pemeliharaan peralatan disesuaikan dengan kebutuhan kerusakan peralatan
			Pengadaan peralatan gedung kantor	jumlah peralatan gedung kantor	10 peralatan	9 peralatan	90	
			Pengadaan bbm dan pelumas	jumlah/volume bbm dan pelumas	8184 liter	8140 liter	99,46	
			Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dihapus	18 peralatan	97 peralatan	538,89	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persentase ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas aparatur /diklat/ bimtek	100	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	jumlah kegiatan peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1 kali	1 kali	100	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai jadwal	100	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 dokumen	4 dokumen	100	
			Penyusunan laporan keuangan	jumlah laporan keuangan	2 dokumen	2 dokumen	100	
			Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	jumlah dokumen standar pelayanan	2 dokumen	2 dokumen	100	
			Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	jumlah dokumen RKA/PRKA dan DPA/DPPA	4 dokumen	4 dokumen	100	
			Penyusunan/Reviu Renstra	jumlah dokumen Renstra	1 dokumen	1 dokumen	100	
			Penyusunan Renja/RKT	jumlah dokumen Renja/RKT	1 dokumen	1 dokumen	100	
			Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	jumlah Survei Kepuasan Masyarakat	2 dokumen	2 dokumen	100	

1) Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut :

Sasaran 1 : **Meningkatnya penempatan tenaga kerja yang kompeten.**

Indikator 1 : Persentase pencari kerja yang ditempatkan, dengan target 40% telah berhasil terealisasi sebesar 73,49% dengan capaian sebesar 183,73%. Indikator ini dapat terlaksana melalui program :

1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.
2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Ketenagakerjaan Sektor Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.

Indikator 2 : Persentase lulusan pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi, dengan target 25% telah berhasil terealisasi sebesar 35,90% atau dengan capaian sebesar 143,59%. Indikator ini dapat terlaksana melalui program :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja**.**
2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang ketenagakerjaan sektor Pelatihan dan Produktivitas.

Sasaran 2 : Meningkatnya pemahaman pengusaha dan pekerja terkait hubungan industrial.

Indikator 1 : Persentase sengketa pengusaha-pekerja per tahun, dengan target 4,35% telah berhasil terealisasi sebesar 3,57% dengan capaian sebesar 117,98%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan.

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan ketenagakerjaan.

Indikator 1 : Nilai Survei Kepuasan masyarakat, dengan target 80,45 telah berhasil terealisasi

sebesar 81,83 dengan capaian sebesar 101,72%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan.

B. Realisasi Anggaran.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 90,06% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.8
Realisasi Anggaran Dinas Tenaga Kerja Kota Malang
Tahun 2019

No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1	**Sasaran 1 : Meningkatnya penempatan tenaga kerja yang kompeten.**	**2,325,020,450.00**	**2,118,189,903.00**	**91.10**
1.1.	**Program Peningkatan Kesempatan Kerja**	**547,057,200.00**	**25,255,350.00**	**77.74**
1.1.1.	Penyusunan database tenaga kerja daerah	130,000,000.00	15,448,150.00	88.81
1.1.2.	Pembinaan Bursa Kerja Khusus	115,191,200.00	15,191,200.00	100.00
1.1.3.	Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Makro	114,800,000.00	7,550,000.00	6.58
1.1.4.	Sosialisasi Perlindungan CTKI	187,066,000.00	87,066,000.00	100.00
1.2.	**Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Ketenagakerjaan Sektor Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja**	**750,000,000.00**	**71,501,067.00**	**89.53**
1.2.1.	Pelayanan Perluasan Kesempatan Kerja bagi Pencari Kerja	513,663,789.00	35,164,856.00	84.72
1.2.2.	Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja bagi Pencari Kerja	236,336,211.00	36,336,211.00	100.00
1.3.	**Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja**	**577,963,250.00**	**75,478,450.00**	**99.57**
1.3.1.	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan keterampilan dan Produktivitas	499,568,250.00	97,083,450.00	99.50
1.3.2.	Pembinaan Lembaga Produktivitas	78,395,000.00	78,395,000.00	100.00

No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
1.4.	**Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang ketenagakerjaan sektor Pelatihan dan Produktivitas**	**450,000,000.00**	**45,954,636.00**	**99.10**
1.4.1.	Pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat	450,000,000.00	45,954,636.00	99.10
2	**Sasaran 2 : Meningkatnya pemahaman pengusaha dan pekerja terkait hubungan industrial.**	**857,494,550.00**	**825,887,600.00**	**96.31**
2.1	**Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan**	**857,494,550.00**	**825,887,600.00**	**96.31**
2.1.1.	Pembinaan tentang Pemahaman dan Tata Cara Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	221,289,000.00	215,289,000.00	97.29
2.1.2.	Pembinaan dan pemberdayaan Serikat pekerja/Serikat Buruh di kota Malang	57,028,000.00	57,028,000.00	100.00
2.1.3.	Pembinaan LKS Tripartit Kota Malang dan Pemantauan UMK dan THR	130,000,000.00	127,605,600.00	98.16
2.1.4.	Sosialisasi UMK Kota Malang	80,000,000.00	79,396,000.00	99.25
2.1.5.	Pembahasan Usulan UMK Malang	150,000,000.00	143,705,500.00	95.80
2.1.6.	Bimbingan Teknis Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja	48,118,000.00	48,118,000.00	100.00
2.1.7.	Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai pembanding UMK Malang Tahun Berjalan	55,000,000.00	52,456,000.00	95.37
2.1.8.	Bimbingan Teknis Struktur dan Skala Upah	116,059,550.00	102,289,500.00	88.14
3	**Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah.**	**1,084,665,000.00**	**898,757,468.00**	**82.86**
3.1.	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**533,560,000.00**	**438,290,168.00**	**82.14**
3.1.1.	Penyediaan jasa surat menyurat	40,480,000.00	36,100,000.00	89.18
3.1.2.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	32,600,000.00	19,722,533.00	60.50
3.1.3.	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah	29,050,000.00	15,424,725.00	53.10
3.1.4.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	8,500,000.00	6,112,900.00	71.92
3.1.5.	Penyediaan jasa administrasi keuangan	82,650,000.00	74,102,100.00	89.66
3.1.6.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	44,190,000.00	44,190,000.00	100.00
3.1.7.	Penyediaan alat tulis kantor	48,320,000.00	37,586,800.00	77.79
3.1.8.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	43,930,000.00	38,058,000.00	86.63
3.1.9.	Penyediaan makanan dan minuman	12,250,000.00	10,724,000.00	87.54
3.1.10.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	129,000,000.00	98,278,610.00	76.18
3.1.11.	Peringatan/Kegiatan Insidentil	30,250,000.00	25,650,500.00	84.80
3.1.12.	Penyediaan Jasa Pengemudi/Supir Dinas	32,340,000.00	32,340,000.00	100.00
3.2.	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**326,590,000.00**	**264,140,900.00**	**80.88**
3.2.1.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	32,000,000.00	24,039,500.00	75.12

No	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
3.2.2.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	26,620,000.00	9,331,000.00	35.05
3.2.3.	Pengadaan peralatan gedung kantor	128,950,000.00	102,630,000.00	79.59
3.2.4.	Pengadaan bbm dan pelumas	89,020,000.00	88,579,400.00	99.51
3.2.5.	Penghapusan Barang Milik Daerah	50,000,000.00	39,561,000.00	79.12
3.3.	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**100,000,000.00**	**92,396,600.00**	**92.40**
3.3.1.	Peningkatan/Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100,000,000.00	92,396,600.00	92.40
3.4.	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan, capaian kinerja, dan keuangan**	**124,515,000.00**	**103,929,800.00**	**83.47**
3.4.1.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10,080,000.00	5,142,600.00	51.02
3.4.2.	Penyusunan laporan keuangan	8,050,000.00	6,624,200.00	82.29
3.4.3.	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	7,800,000.00	4,667,000.00	59.83
3.4.4.	Penyusunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	8,700,000.00	5,990,000.00	68.85
3.4.5.	Penyusunan/Reviu Renstra	26,565,000.00	26,565,000.00	100.00
3.4.6.	Penyusunan Renja/RKT	57,000,000.00	50,767,000.00	89.06
3.4.7.	Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat	6,320,000.00	4,174,000.00	66.04
	TOTAL ANGGARAN	**4,267,180,000.00**	**3,842,834,571.00**	**90,06**

II. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG.

Akuntabilitas kinerja yang diuraikan pada bab ini adalah menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Malang Tahun 2019 dengan rencana, serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditentukan dengan tahap berorientasi pada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Malang.

Secara umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Malang telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal di Kota Malang, baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional dan berjalan dengan baik.

Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah terletak pada pengukuran kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran dilakukan terhadap hasil suatu penilaian secara sistematik yang didasarkan pada indikator Input, Output dan Outcome. Pengukuran kinerja mencakup: (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing unit kerja terhadap kinerja kegiatannya, dan (2) tingkat pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang terhadap dokumen rencana kinerja yang telah ditetapkan. Setelah diperolah data hasil pengukuran kinerja maka dilakukan pengukuran tingkat pencapaian sasaran. Pengukuran ini dilakukan dengan metode perbandingan antara rencana tingkat capaian (target) dengan realisasi capaian dari setiap kegiatan untuk mencapai sasaran.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Capaian Kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :

- Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Meningkatnya Nilai Penanaman Modal dan Investasi Daerah
- Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan
- Terpenuhinya kontribusi IMB terhadap PAD

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2019 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjikan kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

Realisasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang pada Tahun 2018 yang diukur sesuai dengan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9
Target dan Realisasi Kinerja
Tahun 2019

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019	KETERANGAN
Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks kematangan SPBE pada aspek Pelayanan Publik	2,6	2,67	103%	
Meningkatnya Nilai Penanaman Modal dan Investasi Daerah	Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	3.60%	12,71%	353%	
Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	85	88	103%	
	Persentase penerbitan izin dan non izin	80%	97%	121%	
Terpenuhinya kontribusi IMB terhadap PAD	Persentase realisasi target retribusi IMB	100%	116%	116%	

Adapun Capaian Kinerja target Sasaran Strategis dari setiap indikator mempunyai rata-rata keberhasilan sebesar 159% pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang sebesar 102 %.

2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan

dan pencapaian sasaran strategi Dinas tenaga Kerja Kabupaten Bandung dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kenerja yang diharapkan untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran serta indikator sasaran.

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020, 2021, 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.10
Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2018-2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase kematangan SPBE pada Aspek Pelayanan Publik	2,67	-	-	-	-	103%	-	-	-	-
Meningkatnya Nilai Penanaman Modal dan Investasi Daerah	Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	12,71 %	-	-	-	-	353%	-	-	-	-
Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	88	-	-	-	-	103%	-	-	-	-
	Persentase penerbitan izin dan non izin	97%	-	-	-	-	121%	-	-	-	-
Terpenuhinya kontribusi IMB terhadap PAD	Persentase realisasi target retribusi IMB	116 %	-	-	-	-	116%	-	-	-	-

Pengukuran Kinerja dari tahun 2018-2023 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kinerjanya adalah sebagai berikut :

a) Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik

a. **Indikator Kinerja 1** :

Persentase Kematangan SPBE pada aspek pelayanan publik.

Untuk indeks Kematangan SPBE pada Aspek Pelayanan Publik tahun 2019 ditargetkan 2,6 dan terealisasi sebesar 2,67 artinya untuk capaian telah melebihi target.

b) Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Nilai Penanaman Modal dan Investasi Daerah

a. Indikator Kinerja 1 :

Persentase Peningkatan Nilai Penanaman Modal dan Investasi Daerah.

Nilai Penanaman Modal dan Investasi pada tahun 2019 mengalami kenaikan cukup tinggi dari nilai Rp. 11.149.637.116.276,30 pada tahun 2018 menjadi 146.901.986.764.636 di tahun 2019 (data bersumber dari LKPM dan OSS), sehingga capaian indikator peningkatan nilai investasi terpenuhi.

c) Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan

a. Indikator Kinerja 1 :

Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perizinan dan Non Perizinan.

Pada indikator Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perizinan dan Non Perizinan untuk tahun 2019 mengalami kenaikan jika dibanding dengan nilai SKM tahun 2018 yaitu sebesar 80, untuk semester I nilai SKM 83,80 sedang nilai SKM pada semester II adalah 92,00 sehingga apabila dirata-rata menjadi 88.

b. Indikator Kinerja 2 :

Persentase Penerbitan Izin dan Non Izin

Pada tahun 2019 jumlah seluruh izin yang diterbitkan sebanyak 10.407 dari jumlah permohonan izin yang masuk 10.781, sehingga persentase Penerbitan Izin san Non Perizinan

sebesar 97% . Sedangkan pada tahun 2018 persentase izin yang diterbitkan sebesar 97% jadi pada tahun 2019 persentase Penerbitan izin masih tetap sama dengan tahun 2018 tidak mengalami kenaikan.

d) Sasaran Strategis 4 : Terpenuhinya kontribusi IMB terhadap PAD

a. Indikator Kinerja 1 :

Persentase Realisasi Target Retribusi IMB

Capaian realisasi target retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Tahun 2019 sebesar 116 % (melebihi target), dimana target retribusi IMB sebesar Rp. 9.450.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 10.949.722.910. Bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yaitu 101 % maka mengalami kenaikan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis.

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2019 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2018-2023, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.11

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka menengah	Realisasi Kinerja				
			2019	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	2	3	5	6	7	8	9
1.	Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase kematangan SPBE pada aspek Pelayanan Publik	2,6	2,67	-	-	-	-
2.	Meningkatnya Nilai Penanaman Modal dan Investasi Daerah	Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	3.60%	12,71 %	-	-	-	-

3.	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	85	88	-	-	-	-
		Persentase penerbitan izin dan non izin	80%	97%	-	-	-	-
4.	Terpenuhinya kontribusi IMB terhadap PAD	Persentase realisasi target retribusi IMB	100%	116%	-	-	-	-

4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/Standar Nasional lainnya.

Tabel 3.12
Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja	Standar Nasional	
				Target	Realisasi
			2019	2019	2019
1	2	2	4	5	6
	NIHIL				

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, urusan penanaman modal menjadi urusan wajib non dasar sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang tidak memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM).

5. Analisa Penyebab keberhasilan/ Kegagalan.

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2019 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

1) Sasaran Strategis : Terwujudnya Sistem Pemerintahn Berbasis Elektronik, rata2 capaian indikator sebesar 103% sesuai yang diperjanjikan dapat dicapai secara maksimal lebih dari 100%.
   a. Indikator 1 : Persentase kematangan SPBE pada aspek Pelayanan Publik telah mencapai 2,67% lebih dari target sebesar 2,6% karena telah dilaksanakan kegiatan Pengembangan SIM PMPTSP.
2) Sasaran Strategis : Meningkatnya Nilai Penanaman Modal dan Investasi Daerah (rata2 capaian indikator sekitar 353%) sesuai yang diperjanjikan dapat dicapai secara maksimal lebih dari 100% karena Nilai Investasi pada tahun 2019 cukup tinggi.
   a. Indikator 1 : Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah mencapai 12,71% lebih dari 3,60% dari target karena telah dilaksanakan fasilitasi kemitraan dengan pelaku usaha, monitoring Penanaman Modal dan promosi investasi.
3) Sasaran Strategis : Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan (rata2 capaian indikator sekitar 112%) sesuai yang diperjanjikan dapat dicapai secara maksimal lebih dari 100% karena kinerja pelayanan selalu ditingkatkan dan menjadi perhatian khusus agar memperoleh kepuasan pemohon / masyarakat.
   a. Indikator 1 : Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan mencapai nilai 88 lebih dari nilai 85 dari target karena dalam memberikan pelayanan kepada pemohon/masyarakat mengutamakan kepuasan masyarakat baik secara prosedur maupun pelayanan.
   b. Indikator 2 : Persentase penerbitan izin dan non izin 97% mencapai lebih dari 80% dari target karena jumlah permohonan izin yang masuk telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga bisa diterbitkan izinnya.

4) Sasaran Strategis : Terpenuhinya kontribusi IMB terhadap PAD (rata2 capaian indikator sekitar 116%) sesuai yang diperjanjikan dapat dicapai secara maksimal lebih dari 100% karena untuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dikenakan retribusi yang dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang.

a. Indikator 1 : Persentase realisasi target retribusi IMB **(Berhasil)** mencapai 116% lebih dari nilai 100% dari target karena kinerja pelayanan khususnya terkait Izin Mendirikan Bangunan selalu ditingkatkan dan dilakukan pula pelayanan perizinan keliling agar memudahkan dan mendekatkan masyarakat dalam pengurusan Izin.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan Sumberdaya

Tabel 3.13
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase kematangan SPBE pada aspek Pelayanan Publik	2,6%	2,67%	103%	104.680.000	99.114.000	95%	108,42
Meningkatnya Nilai Penanaman Modal dan Investasi Daerah	Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	3,60%	12,71%	353%	851.843.638	756.930.486	89%	396,63
Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	85	88	103%	2.743.033.362	2.501.173.124	91%	113,19
	Persentase penerbitan izin dan non izin	80%	97%	121%	293.860.000	275.160.000	94%	128,72
Terpenuhinya kontribusi IMB terhadap PAD	Persentase realisasi target retribusi IMB	100%	116%	116%	923.612.000	807.215.000	87%	133,33

Catatan : > 100%, maka penggunaan dana efektif

< 100%, maka penggunaan dana belum efektif

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja.

1) Indikator Persentase kematangan SPBE pada aspek Pelayanan Publik dengan capaian kinerja 103% dan capaian anggaran 95%, menunjukkan bahwa adanya efisiensi anggaran 5% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 108,42%.
2) Indikator Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah dengan capaian kinerja 353% dan capaian anggaran 91%, menunjukkan bahwa adanya efisiensi anggaran sebesar 9% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 396%.
3) Indikator Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan dengan capaian kinerja 103% dan capaian anggaran 91%, menunjukkan bahwa adanya efisiensi anggaran sebesar 9% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 113,39%.
4) Indikator Persentase penerbitan izin dan non izin dengan capaian kinerja 121% dan capaian anggaran 94%, menunjukkan bahwa adanya efisiensi anggaran sebesar 6% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 128,72%.
5) Indikator dengan capaian kinerja 116% dan capaian anggaran 87%, menunjukkan bahwa adanya efisiensi anggaran sebesar 13% dan efektifitas penggunaan dana sebesar 133,33%.

7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Tabel. 3.14
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana tindak lanjut
Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase kematangan SPBE pada aspek Pelayanan Publik	103%	• Pengolahan Data dan Informasi	Persentase Sistem Informasi yang dapat diakses masyarakat	80%	80%	100%	Pengintegrasian SIM
Meningkatnya Nilai Penanaman Modal dan Investasi Daerah	Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	353%	• Pengembangan Iklim Penanaman Modal • Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal	• Nilai Penanaman Modal dan Investasi • Persentase Peningkatan Jumlah Minat Investasi	3,60 15	0.083 0,21	2,31 1,40	
Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	103%	• Pelayanan Administrasi Perkantoran • Peningkatan Sarana prasarana aparatur • Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan • Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	• Persentase Tersedianya Administrasi Perkantoran • Persentase Meningkatnya Sarana prasarana aparatur • Persentase terpenuhinya laporan Capaian Kinerja dan keuangan • Persentase ASN yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Aparatur diklat/bimtek	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100% 100%	
	Persentase penerbitan izin dan non izin	121%	Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan	Persentase Penerbitan non perizinan	80%	1,34%	1,68%	
Terpenuhinya kontribusi IMB terhadap PAD	Persentase realisasi target retribusi IMB	116%	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	• Persentase Penerbitan Perizinan • Persentase realisasi target retribusi IMB	80% 100%	3.17% 116%	3,96% 116%	

1) Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut :

Sasaran : Terwujudnya Sistem Pemerintahn Berbasis Elektronik

Indikator 1 :

Persentase Kematangan SPBE pada aspek pelayanan publik , dengan target 2,6 telah berhasil tercapai sebesar 2,67 atau tercapai 103%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Pengolahan Data dan Informasi.

Sasaran: Meningkatnya Nilai Penanaman Modal dan Investasi Daerah

Indikator 1 :

Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah, dengan target 3,60% telah berhasil tercapai sebesar 12,71% atau tercapai 353%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

- Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
- Program Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal.

Sasaran: Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan

Indikator 1 :

Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan, dengan target 85 telah **berhasil** tercapai sebesar 88 atau tercapai 103%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana prasarana aparatur
- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator 2 :

Persentase penerbitan izin dan non izin, dengan target 80% telah berhasil tercapai sebesar 97% atau tercapai 121%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

- Program Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan.

Sasaran: Terpenuhinya kontribusi IMB terhadap PAD

Indikator 1 :

Persentase realisasi target retribusi IMB, dengan target 100% telah berhasil tercapai sebesar 116% atau tercapai 116%. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program :

- Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan.

C. Realisasi Anggaran.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar 90,54% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.15
Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019

No.	Uraian	Jumlah (Rp)		%
		Anggaran	Realisasi	
	Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan			
	Program pelayanan administrasi perkantoran	1.151.359.500,00	1.049.055215,00	91,11
	Kegiatan :			
	penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	133.200.000,00	106.486.970,00	79,95
	penyediaan jasa kebersihan kantor	131.643.000,00	130.723.000,00	99,30
	penyediaan alat tulis kantor	181.325.500,00	173.380.800,00	95,82
	penyediaan barang cetakan dan pengandaan	218.257.000,00	199.357.500,00	91,34

	penyediaan komponen instalasi lisrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000,00	6.805.200,00	68,05
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	46.190.000,00	41.570.000,00	90,00
	Penyediaan makanan dan minuman	75.744.000,00	74.868.000,00	98,84
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	265.000.000,00	227.592.545,00	85,88
	Peringatan/Kegiatan Insidentil	40.000.000,00	39.200.000,00	98,00
	Pengelolaan Perpustakaan dan Arsip	50.000.000,00	49.071.200,00	98,14
	Program peningkatan sarana aparatur dan prasarana aparatur	**1.032.966.362,00**	**917.159.409,00**	**88,79**
	Kegiatan :			
	Pengadaan peralatan gedung kantor	499.861.362,00	435.944680.00	87,21
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	334.105.000,00	312.084.729,00	93,41
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	32.000.000,00	17.875.000,00	55,86
	Pengahpusan Barang Milik Daerah	40.000.000,00	30.710.000,00	76,78
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/ bangunan	127.000.000,00	120.545.000,00	94,92
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	**92.975.000,00**	**92.975.000,00**	**100,00**
	Kegiatan :			
	Peningkatan/pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	92.975.000,00	92.975.000,00	100,00
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan,capaian kinerja, dan keuangan	**465.723.500,00**	**441.983.500.00**	**94,31**
	Kegiatan:			
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	20.000.000,00	18.862.000,00	94,31
	Penyusunan laporan keuangan	188.100.000,00	183.489.000,00	97,55
	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat	6.600.000,00	5.000.600,00	84,85
	Pelaksanaan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00
	Penyusunan/Reviu Standar Pelayanan	77.018.500,00	71.799.500,00	93,22
	Penyususunan RKA/PRKA dan DPA/DPPA	24.750.000,00	15.753.000,00	63,65
	Sertifikasi standar mutu manajemen/Pelayanan	93.280.000,00	90.505.000,00	97,03
	Penyusunan/Reviu Renstra	15.830.000,00	15.830,000,00	100,00
	Penyusunan Renja/RKT	27.645.000,00	27.645.000,00	100,00
	Program penyelenggaraan non perizinan	**293.860.000,00**	**275.160.000,00**	**93,64**
	Kegiatan:			
	Peninjauan Lapangan Tim Teknis Non perizinan	139.485.000,00	123.445.000,00	88,50
	Peninjauan Lapangan Permohonan TDUP	42.150.000,00	41.750.000,00	99,05
	Monitoring dan pengawasan Non Perizinan	69.775.000,00	67.830.000,00	97,21
	Monitoring dan pengawasan TDUP	42.450.000,00	42.135.000,00	99,26
	Sasaran Meningkatnya Nilai Penanaman Modal dan Investasi Daerah			

	Program Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal	**388.380.306,00**	**299.443.654,00**	**77,10**
	Kegiatan:			
	Promosi Penanaman Modal	188.380.396,00	188.380.306,00	100,00
	Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Penanaman Modal	200.000.000,00	111.063.348,00	55,53
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	**463.463.332,00**	**457.486.832,00**	**98,71**
	Kegiatan:			
	Penyusunan bahan pengembangan iklim penanaman modal	74.250.000,00	73.632.500,00	99,17
	Fasilitasi dan Pembahasan Penyusunan Naskah Kerjasama	41.930.000,00	41.930,000,00	100,00
	Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	86.818.332,00	86.818.332,00	100,00
	Peningkatan Kerjasama Strategis (Kemitraan)	42.700.000,00	42.700.000,00	100,00
	Fasilitasi koordinasi di Bidang Penanaman Modal dengan instansi pemerintah dan dunia	217.765.000,00	212.406.000,00	97,54
	Sasaran Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
	Program pengolahan data informasi	**423.890.000,00**	**400.308.750,00**	**94,44**
	Kegiatan			
	Pengelolaan pelayanan pengaduan	70.700.000,00	66.525.000,00	94,09
	Pengembangan Sistem Informasi Managemen DPMPTSP	104680.000,00	99.114.000,00	94,68
	Pengolahan dan Pemutakhiran data perizinan dan nonperizinan dan penanaman modal	73.510.000,00	64.140.000,00	87,25
	Penyuluhan PM dan PTSP	175.000.000,00	170.529.750,00	97,45
	Sasaran Terpenuhinya kontribusi IMB terhadap PAD			
	Program Penyelenggaraan perizinan	**923.612.000,00**	**807.215.000,00**	**87,40**
	Kegiatan:			
	Penyediaan Jasa Administrasi Izin Reklame Insidentil pada Hari Sabtu (libur)	50.000.000,00	41.953.000,00	83,91
	Pelayanan Perizinan Keliling	76.812.000,00	56.142.000,00	73,09
	Peninjauan Lapangan Permohonan Izin	468.810.000,00	434.330.000,00	92,65
	Monitoring dan Pengawasan Perizinan	277.990.000,00	225.190.000,00	81,01
	Pengaturan tata cara pelayanan di bidang pelayanan perizinan	50.000.000,00	49.600.000,00	99,20

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana strategis dan Perjanjian Kinerja sekaligus sebagai gambaran mengenai tingkat capaian pelaksanaan kegiatan, program, kebijaksanaan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Dinas Tenaga Kerja Kota Malang memiliki kategori pencapaian "sangat berhasil" dengan rata-rata pencapaian sebesar 136,75%, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang memiliki kategori pencapaian "sangat berhasil" dengan rata-rata pencapaian sebesar 159, dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarannya. Sedangkan hasil capaian kinerja keuangan pada Dinas Tenaga Kerja sebesar 90,06% dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar 90,54%.

Untuk menindaklanjuti berbagai realisasi capaian dalam tahun 2019 dan dalam upaya untuk segera mungkin dapat mengeliminasikan permasalahan yang dihadapi maka diperlukan konsistensi dan komitmen seluruh aparatur dan unsur masyarakat dalam upaya peningkatan pendayagunaan sumberdaya secara optimal sesuai dengan fungsi dan manfaatnya agar memperoleh capaian kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang.

Dalam hal perencanaan anggaran diupayakan untuk lebih optimal dan berbasis kinerja. Disamping itu, perlu adanya inovasi langkah-langkah kebijakan yang ditempuh untuk mendukung pencapaian sasaran terwujudnya pelayanan Ketenagakerjaan, Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal yang adil, terukur, berkualitas dan akuntabel. Langkah kebijakan selanjutnya yang perlu diprioritaskan adalah meningkatkan penyelenggaraan urusan Ketenagakerjaan, Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan melakukan koordinasi dengan SKPD terkait untuk membentuk Tim Teknis yang nantinya bertugas pada Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang. Sehingga nantinya memudahkan dan mempercepat didalam pelayanan perizinan kepada masyarakat tanpa ada rekomendasi lagi dari Dinas teknis terkait.

LAMPIRAN I

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2018 - 2023

TABEL 7.1

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2019-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Kondisi Akhir
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Tercapaianya Penangan Tingkat Penganggguran Terbuka (TPT)	Meningkatnya Penempatan Tenaga kerja yang kompeten	1. Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan		38,73%	40,00%	45,00%	50,00%	55,00%	60,00%	
			2.Persentase Lulusan Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertivikat Kompetensi		20,00%	25,00%	25,00%	30,00%	30,00%	35,00%	
		Meningkatnya Pemahaman pengusha dan Pekerja terkait Hubungan Industrial	Persentase sengketa pengusaha-pekerja per tahun		4,40%	4,35%	4,30%	4,25%	4,20%	4,15%	
		Meningkatnya Pelayanan Ketenagakerjaan	Nilai survei Kepuasan Masyarakat tahun		80,33	80,45	80,85	81,26	81,66	82,00	

Tabel 7.1

Penetapan Indikator Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	**Indikator Tujuan :** 1. Rasio Realisasi Penerimaan Retribusi IMB							100%	100%
2	2. Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah							4%	4%
3	**Indikator Sasaran 1 :** Persentase kematangan kapabilitas proses SPBE			75	80	85	90	95	95
4	**Indikator Sasaran 2 :** Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah			3.6	3.7	3.8	3.9	4	4
5	**Indikator Sasaran 3 :** Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan		87	85	85.5	86	86.5	87	87
6	**Indikator Sasaran 4 :** Persentase penerbitan izin dan non izin			80	82.5	85	87.5	90	90
7	**Indikator Sasaran 5 :** Persentase realisasi target retribusi IMB			100%	100%	100%	100%	100%	100%

LAMPIRAN II

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

PEMERINTAH KOTA MALANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. SUPRANOTO, M.Kes**

Jabatan : **Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Malang**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Drs. H. SUTIAJI**

Jabatan : **WALIKOTA MALANG**

Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2019

WALIKOTA MALANG,	Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MALANG,
Drs. H. SUTIAJI	**dr. SUPRANOTO, M.Kes**
	Pembina Utama Muda
	NIP. 19591219 198802 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS TENAGA KERJA KOTA MALANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja yang kompeten	1. Persentase pencari kerja yang ditempatkan	40.00%
		2. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	25.00%
2	Meningkatnya pemahaman pengusaha dan pekerja terkait hubungan industrial	1. Persentase sengketa pengusaha-pekerja pertahun	4.35%
3	Meningkatnya pelayanan ketenagakerjaan	1. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	80.45%

	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	533,560,000.00	APBD
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp	326,590,000.00	APBD
3	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp	37,240,000.00	APBD
4	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp	208,990,000.00	APBD
5	Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Rp	600,000,000.00	APBD
6	Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp	623,000,000.00	APBD
7	Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp	614,800,000.00	APBD
8	Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Ketenagakerjaan sektor Pelatihan dan Produktivitas	Rp	500,000,000.00	DBHCHT
9	Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Ketengakerjaan Sektor Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	Rp	500,000,000.00	DBHCHT
	TOTAL	Rp	3,944,180,000.00	

WALIKOTA MALANG,

Drs. H. SUTIAJI

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA MALANG,

dr. SUPRANOTO, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19591219 198802 1 002

PEMERINTAH KOTA MALANG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **dr. SUPRANOTO, M.Kes.**

Jabatan : **Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MALANG**

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : **Drs. H. SUTIAJI**

Jabatan : **WALIKOTA MALANG**

Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penghargaan dan sanksi.

Malang, 2 September 2019

WALIKOTA MALANG,

Drs. H. SUTIAJI

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA KOTA MALANG,

dr. SUPRANOTO, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591219 198802 1 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS TENAGA KERJA KOTA MALANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja yang kompeten.	1. Persentase pencari kerja yang ditempatkan	40,00%
		2. Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	25,00%
2.	Meningkatnya pemahaman pengusaha dan pekerja terkait hubungan industrial.	1. Persentase sengketa pengusaha dan pekerja per tahun	4,35%
4.	Meningkatnya dukungan peningkatan kualitas pelayanan ketenagakerjaan	1. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	80,45

	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	533.560.000,00	APBD
2	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp	326.590.000,00	APBD
3	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp	100.000.000,00	APBD
4	Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp	124.515.000,00	APBD
5	Program Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja	Rp	577.963.250,00	APBD
6	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp	857.494.550,00	APBD
7	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp	547.057.200,00	APBD
8	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang ketenagakerjaan sektor Pelatihan dan Produktivitas	Rp	450.000.000,00	APBD
9	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di bidang Ketenagakerjaan Sektor Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan	Rp	750.000.000,00	APBD

Malang, 2 September 2019

WALIKOTA MALANG,

Drs. H. SUTIAJI

Plt. KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KOTA MALANG,

dr. SUPRANOTO, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19591219 198802 1 002

PEMERINTAH KOTA MALANG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. SUBKHAN

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : Drs. H. SUTIAJI

Jabatan : WALIKOTA MALANG

Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, Januari 2019

WALIKOTA MALANG,	Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG,
Drs. H. SUTIAJI	Drs. SUBKHAN Pembina Utama Muda NIP. 19680408 198809 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1	2		3	4
1	Meningkatkan kinerja penanaman modal dan investasi daerah	1	Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	3%
2	Meningkatkan kinerja Pelayanan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan	2	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	84

	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Rp	1.097.891.500,00	PAD
2.	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp	519.180.000,00	PAD
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	100.000.000,00	PAD
4.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja, dan keuangan	Rp	507.008.500,00	PAD
5.	Program Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal	Rp	335.000.000,00	PAD
6.	Program Pengolahan Data dan Informasi	Rp	423.480.000,00	PAD
7.	Program Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan	Rp	296.080.000,00	PAD
8.	Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Rp	1.107.240.000,00	PAD
9	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	400.000.000,00	PAD

Malang,

WALIKOTA MALANG,

Drs. H. SUTIAJI

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG,

Drs. SUBKHAN

Pembina Utama Muda

NIP. 19680408 198809 1 001

(14)

PEMERINTAH KOTA MALANG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu
Nama : Drs. H. SUTIAJI
Jabatan : WALIKOTA MALANG
Selaku Atasan Langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perubahan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malang, September 2019

WALIKOTA MALANG,	**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**
Drs. H. SUTIAJI	**ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT** Pembina Tingkat I NIP. 19730423 199803 1 004

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1	2		3	4
1	Terpenuhinya Kontribusi IMB terhadap PAD	1	Persentase realisasi terget retribusi IMB	100%
2	Terwujudnya Sistem Pemerintah berbasis Elektronik	2	Persentase kematangan kapasitas proses SPBE	34%
3	Meningkatnya Nilai Survei Kepuasan Masyarakat, terhadap Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal	3	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Perizinan dan Non Perizinan	85
4	Meningkatnya Nilai Penanaman Modal dan Investasi Daerah	4	Persentase peningkatan nilai Penanaman Modal dan Investasi Daerah	3,6%

PROGRAM	ANGGARAN		KETERANGAN
1. Program Pelayanan administrasi perkantoran	Rp	1,151,359,500.00	PAD
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp	1,032,966,362.00	PAD
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp	92,975,000.00	PAD
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja, dan keuangan	Rp	465,723,500.00	PAD
5. Program Pengendalian dan Promosi Penanaman Modal	Rp	388,380,306.00	PAD
6. Program Pengolahan Data dan Informasi	Rp	423,890,000.00	PAD
7. Program Penyelenggaraan Pelayanan Non Perizinan	Rp	293,860,000.00	PAD
8. Program Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	Rp	923,612,000.00	PAD
9 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp	463,463,332.00	PAD

Malang, September 2019

WALIKOTA MALANG,

Drs. H. SUTIAJI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19730425 199803 1 004

LAMPIRAN III

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019
DINAS TENAGA KERJA KOTA MALANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target Tahun 2019	KINERJA TAHUN 2019							
					Tribulan I		Tribulan II		Tribulan III		Tribulan IV	
					Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)		(7)		(8)	
1.	Meningkatnya penempatan tenaga kerja yang kompeten	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi Jumlah pencari kerja terdaftar dikali 100%	40,00%	39,47%	98,68	46,39%	115,98	46%	115,98	73,49%	183,73
		Persentase lulusan pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi dibagi Jumlah peserta pelatihan dikali 100%	25,00%	39,47%	157,89	70,63%	282,53	82,17%	328,67	35,90%	143,59
2.	Meningkatnya pemahaman pengusaha dan pekerja terkait hubungan industrial	Persentase sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial yang didaftarkan dibagi Jumlah perusahaan dikali 100%	4,35%	0,69%	184,05	1,68%	161,27	2,58%	140,76	3,57%	117,98
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan ketenagakerjaan	Nilai Survei Kepuasan masyarakat	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat tahun n	80,45	81,33	101,09	81,34	101,11	81,34	101,11	81,83	101,72

Malang, Februari 2020
KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730428 199803 1 004

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2019

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MALANG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2019	KINERJA TAHUN 2019							
				Tribulan I		Tribulan II		Tribulan III		Tribulan IV	
				Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)	
1.	Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks kematangan SPBE pada aspek Pelayanan Publik	2,60	0,00	0,00		0,00	0	0,00	2,67	103
2.	Meningkatnya Nilai Penanaman Modal dan Investasi Daerah	Persentase peningkatan nilai penanaman modal dan investasi daerah	3,60%	0,01%	0,28	0,14%	3,89	0,64%	17,78	12,71%	353
3.	Meningkatnya kualitas layanan perizinan dan non perizinan	Nilai Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perizinan dan non perizinan	85	-	0,00	0,00	0,00	71,24	83,81	88	104
		Persentase penerbitan izin dan non izin	80%	67,72%	84,64	110,03%	137,53	83%	104,04	97%	121
4.	Terpenuhinya kontribusi IMB terhadap PAD	Persentase realisasi target retribusi IMB	100%	24,70%	24,70	38,86%	38,86	33,67%	33,67	116%	116

Malang, Februari 2020

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

ERIK SETYO SANTOSO, ST, MT'

Pembina Utama Muda

NIP. 19730425 199803 1 004